

Amin Imron adalah sosok kiai, sekaligus politikus. Ayahnya merupakan salah satu tokoh sentral PPP, tidak hanya di daerah Bangkalan, tapi tingkat nasional.

Trah politik RA Fuad terasa sejak pasca reformasi, tepatnya ketika dia menduduki kursi anggota DPR RI periode 1999–2004. Maklum, kala itu Ra Fuad adalah keturunan langsung Bani Kholil, keluarga besar ulama' legendaris Madura. Ra Fuad adalah anak Kiai Amin Imron, cucu Syaikhona Kholil. Status itulah yang membuat nama Ra Fuad begitu dihormati oleh warga Bangkalan.

Dari situ pula, dinasti politik trah kiai juga begitu terasa di setiap periode pemilu. Contohnya, ketika Ra Fuad tercatat sebagai pengurus PKB (waktu itu menjabat wakil ketua DPW PKB Jatim), partai tersebut juga selalu menjadi pemenang. Seperti pada Pemilu 1999 dan 2004, PKB mendapat 24 kursi. Sedangkan, pada Pemilu 2009, PKB Bangkalan yang diketuai Fuad juga menjadi pemenang meski hanya mendapat sepuluh kursi. Konflik besar-besaran di PKB kala itu akhirnya membuat Fuad memilih hengkang dan berlabuh di Partai Gerindra.

Modal politik itu juga yang membuat dia begitu mulus saat maju sebagai kandidat bupati Bangkalan pada pilkadfa 2003. Sempat terlibat perebutan tiket pencalonan bupati dengan Kiai Imam Bukhori, (keponakannya sendiri) akhirnya Ra Fuad melenggang sebagai kandidat yang diusung PKB. Hasilnya, dia menang mutlak.

Demikian juga saat pilkada di Kabupaten Bangkalan 2008. Tanpa ada tandingan, beliau terpilih kembali sebagai bupati untuk yang kedua kalinya. Tidak cukup sampai di situ, setelah tidak bisa mencalonkan bupati, Ra Fuad berusaha melanjutkan kepemimpinannya. Awalnya, dia berencana mencalonkan sang istri, Nyai Siti Masnuri Fuad Amin. Namun, akhirnya yang maju adalah sang putranya, Makmun Ibnu Fuad yang akrab dipanggil Ra Momon. Hasilnya, sang putra mahkota yang maju berpasangan dengan Ra Mondir Rofi'i dan berhasil mengalahkan pesaingnya yakni Nizar Zahro dan Zulkifli.

Hasil pilkada di Kabupaten Bangkalan juga menelurkan rekor. Pertama adalah perolehan suara Ra Momon sebanyak 90 persen serta tercatat sebagai bupati paling muda. Dia dilantik pada usia 26 tahun. Setelah RA Momon duduk dikursi bupati, RA Fuad (ayah dari Ra Momon) maju dalam pemilihan calon legislatif DPRD Bangkalan melalui partai Gerindra, dalam pemilihan calon legislatif tersebut Ra Fuad pun kembali menjadi pemenang pemilu dan duduk sebagai ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa di dalam jajaran Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bangkalan berada di bawah pengaruh kekuasaan RKH. Fuad Amin Imron yang mengakui memiliki keturunan darah Syaikhona Kholil. Sang anak sebagai bupati dan sang ayah sebagai ketua Legislatif di Kabupaten Bangkalan. Dalam proses kepemimpinan Ra Momon sebagai bupati tidak ada perubahan yang

Di beberapa daerah lain, kiai tidak memiliki peran langsung dalam politik namun pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan berpolitik, khususnya di kalangan masyarakat agamis (Islam). Kiai berperan secara tidak langsung, kita dapat melihatnya disaat kader-kader politik berusaha mendapatkan pengaruh di masyarakat. Beragam bentuk pendekatan dilakukan politikus demi memperoleh dukungan seorang kiai.

Namun hal itu tidak terjadi di Bangkalan, kiai bahkan turun langsung dalam percaturan politik. Sudah menjadi jargon, yang menyatakan bahwa masyarakat ikut apa kata kiai di Kabupaten Bangkalan bahkan sampai urusan politik apa kata kiai, itulah yang menjadi jargon. Budaya ini belum tergerus oleh perkembangan zaman walaupun pergeseran-pergeseran nilai terus terjadi setiap masa. Kharisma kiai merupakan senjata paling mujarab untuk mendapatkan pengaruh di masyarakat, dan masyarakatpun secara sadar menerima.

Di Kabupaten Bangkalan kiai yang dianggap berpengaruh adalah kiai yang mempunyai garis keturunan atau trah. Trah yang memang tersambung silsilahnya kepada mbah Kholil, ulama besar yang ada di Kabupaten Bangkalan. Politik yang membawa nama besar seorang kiai sudah menjadi budaya yang begitu kental. Meski sudah ada batasan bahwa kiai hanya bertugas mengurus umat dan tidak mau terlibat kedalam politik praksis. Keberadaan kharismanya masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Setelah menjadi pemimpin, budaya sungkem atau rasa patriotisme seorang santri terhadap kiai tidak pernah ditinggalkan, hal ini rupanya untuk “melanggengkan” kekuasaan. Agar dukungan dari kiai tidak lepas, maka beberapa upayapun dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kiai untuk mengalihkan dukungannya. Untuk melanggengkan kekuasaan, maka seorang pemimpin berusaha meminta nasihat yang akan dijalankan di dalam kebijakan politiknya.

Pengaruh politik trah kiai di Bangkalan memang tak lepas dari sifat ketakdziman seorang santri pada kiainya. Peran santri dalam menyebarkan berita di sekitar pesantren kepada masyarakat memiliki peran penting. Banyak politikus menyekolahkan anaknya di pesantren demi mendapatkan simpati dan pengaruh di lingkungan pesantren yang bersangkutan. Jauh hari sebelum terjun ke dunia politik orang mempunyai pandangan strategis dari kebijakan lokal. Menempatkan anak ke dalam pesantren bertujuan di samping itu juga untuk memperluas pengaruh. Fenomena seperti itu banyak dipraktikkan dan ternyata sudah lama menjadi budaya yang tersembunyi yang masih kurang mendapat kritikan.

Masyarakat yang terpengaruh kepada kiai dimulai saat dalam pesantren kiai mendidik anak-anak para wali santri baik dari Bangkalan maupun dari luar Bangkalan, hal itu sampai sekarang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, peran kiai kholil dimasa itu di teruskan oleh keturunan yang ada sekarang, dimana

bahkan trah kiai menjadi kiblat dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.

C. Dampak Positif dan Negatif Trah Kiai Pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan 2003-2013.

Pengaruh Kiai dalam wilayah politik tidak sekuat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Meskipun menjadi tokoh kharismatik, hanya sedikit pengikut yang merasa terdorong untuk mengikuti langkah politik kiai. Perbedaan antara kiai dan pengikutnya dalam hubungannya dengan perilaku politik akhirnya menjadi fenomena biasa, khususnya setelah berubahnya partai politik Islam. Namun demikian, peran kiai secara umum masih tetap penting karena kiai berada di garis depan dalam membimbing moralitas dan ortodoksi umat Islam.

Sejarah trah kiai yang ada di Kabupaten Bangkalan yang terjun dalam kontestasi politik tentu mempunyai dampak, baik secara sosial ataupun dalam sudut pandang agama. Dampak trah kiai yang naik ke panggung politik dan menguasai pemerintahan selama 10 tahun belakangan menimbulkan pro-kontra, ada yang melihatnya sebagai hal positif, karena dapat menjadi panutan secara moral dan norma agama, namun ada pula yang melihatnya secara negatif, sebab tempat para kiai tak semestinya dalam politik, namun dalam hal *ubudiyah* semata, sebagai mana yang diungkapkan oleh Nur Hakim, *lakonah lekoni*

Bangkalan. Sedangkan konflik yang muncul berawal dari internal kepengurusan partai yang mengusungnya yakni Partai Persatuan Daerah (PPD) yang berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN), antara pengurus lama dengan pengurus baru (ketua dan sekretaris) H.M. Mukhlis Alkomi, S. Pd. sebagai ketua dan Ahmad Rois sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Daerah kepengurusan yang lama, sedangkan dari pengurus baru Supardi sebagai ketua dan Husnan sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Nasional, kedua pengurus partai tersebut saling mengaku menjadi pengurus dan saling menunjukkan SK. Akhirnya H.M. Mukhlis Alkomi S. Pd. dan Ahmad Rois merasa dirinya dirugikan, karena mereka tidak merasa mengusung calon K.H Imam Bukhori dan HR. Zainal Alim sehingga berujung pada mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, dan PTUN memenangkan mereka. Oleh karena itu, KPUD Bangkalan akhirnya mendiskualifikasi pasangan Cabup-Cawabup nomor urut satu yakni pasangan K.H Imam Bukhori dan Zainal Alim.

Didiskualifikasinya pasangan Cabup-Cawabup nomor urut satu K.H Imam Bukhori dan Zainal Alim membuat gejolak di kalangan bawah terutama kalangan santri dan kaum "*blater*". Gejolak santri dan kaum *blater* tersebut sampai pada pendudukan gedung KPUD Bangkalan selama hampir satu minggu. Konsekuensi dari keputusan KPUD tersebut otomatis pilkada Kabupaten Bangkalan hanya diikuti 2 pasangan calon. Setelah melalui proses pencoblosan dan ditetapkanlah pasangan

calon Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon) dan Ra Mundir Rofi'i, sebagai pemenang pilkada tahun 2013. Dampak yang ditimbulkan pada pilkada tahun 2013 ini menjadi langkah awal terbukanya kedok dari sistem politik Ra Fuad sebagai pemegang kebijakan selama ini, adapun dampak-dampaknya sebagai berikut:

- a. Dampak positif trah kiai pasca pilkada tahun 2013
 - ✓ Muh. Makmun Ibnu Fuad sebagai putra RKH. Fuad Amin Imron menjadi Bupati termuda di Indonesia, yakni berusia 26 tahun.
- b. Dampak negatif trah kiai pasca pilkada tahun 2013
 - ✓ Menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, perpecahan yang terjadi antara Gelora mahasiswa peduli rakyat (GEMPAR), Gerakan masyarakat peduli Ra Momon (GEMPUR), dan Gerakan peduli Ra Fuad (GAPURA). Hal mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Bangkalan.
 - ✓ Mengurangi nilai positif kiai sebagai panutan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
 - ✓ Timbulnya konflik di parlemen. Seperti konflik antara kubu pro dan kontran pemerintah Kabupaten Bangkalan diantaranya kubu fraksi PDIP dengan fraksi Partai Gerindra. Konflik ini di picu dengan pencabutan terpilihnya anggota Komisioner Informasi (KI) yakni Aliman Haris yang tidak di SK oleh Ra Momon sebagai Bupati karena berbeda pandangan politik.

